

A. PENJELASAN UMUM

A.1 Profil dan Kebijakan Teknis

Dasar hukum Entitas dan Rencana Strategis

Profil LPP RRI

Lembaga Penyiaran Publik (LPP) adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Radio Republik Indonesia (RRI) merupakan satu-satunya radio yang menyandang nama negara. RRI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Siaran RRI sampai saat ini ditujukan bagi kepentingan bangsa dan negara. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Visi dan Misi LPP RRI

LPP RRI memiliki visi "Menjadikan Layanan Penyiaran Publik Radio Republik berjangkauan terluas, pembangun karakter bangsa, berkelas dunia". Adapun misi LPP RRI antara lain:

1. Memberikan pelayanan informasi terpercaya yang dapat menjadi acuan dan sarana kontrol sosial masyarakat dengan memperhatikan kode etik jurnalistik/kode etik penyiaran.
2. Mengembangkan siaran pendidikan untuk mencerahkan, mencerdaskan, dan memberdayakan serta mendorong kreatifitas masyarakat dalam kerangka membangun karakter bangsa.
3. Menyenggarakan siaran yang bertujuan menggali, melestarikan, dan mengembangkan budaya bangsa, memberikan hiburan yang sehat bagi keluarga, membentuk budi pekerti dan jati diri bangsa di
4. Menyenggarakan program siaran berperspektif gender yang sesuai dengan budaya bangsa dan melayani kebutuhan kelompok minoritas.
5. Memperkuat program siaran di wilayah perbatasan untuk menjaga kedaulatan NKRI.
6. Meningkatkan kualitas siaran luar negeri dengan program siaran yang mencerminkan politik negara dan citra positif bangsa.
7. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses penyelenggaraan siaran mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program siaran.
8. Meningkatkan kualitas audio dan memperluas jangkauan siaran secara nasional dan internasional dengan mengoptimalkan sumberdaya teknologi yang ada dan mengadaptasi perkembangan teknologi
9. Mengembangkan organisasi yang dinamis, efektif, dan efisien dengan sistem manajemen sumber daya (SDM, keuangan, asset, informasi dan operasional) berbasis teknologi informasi dalam rangka
- 10 Memperluas jejaring dan kerjasama dengan berbagai lembaga di dalam dan luar negeri yang saling memperkuat dan menguntungkan.
11. Memberikan pelayanan jasa-jasa yang terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan asset negara secara profesional dan akuntabel serta menggali sumber-sumber penerimaan lain untuk mendukung operasional siaran dan meningkatkan kesejahteraan pegawai.

Tugas dan Fungsi LPP RRI

RRI mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk melaksanakan tugasnya RRI menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan umum dan pengawasan di bidang penyelenggaraan penyiaran radio publik;
- b. pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan penyiaran radio publik;
- c. pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya RRI.

Profil LPP RRI Mataram

Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Mataram merupakan Lembaga Penyiaran yang paling senior berkecimpung berperan membangun Bumi Gora NTB, tidak pernah lekang oleh waktu hingga kini, terus mengudara dengan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat Daerah ini. RRI Mataram berdiri secara resmi pada tahun 1960 dengan kekuatan daya jangkauan siaran yang masih terbatas. Namun demikian semangat juang angkasawan-angkasawati RRI Mataram tidak pernah mengenal lelah, kendati dengan keterbatasan itu, dengan Tim work yang bekerja dengan tulus ikhlas.

Karena itu tidak heran nama-nama reporter dan penyiar di masa lampau, hingga kini masih tetap dalam ingatan pendengarnya. Dari rumah Tiga Dara, rumah yang arsitek dan bangunannya sama yaitu rumah tiga buah berjejer di Jalan Langko 83, disanalah RRI Mataram mulai mengudara. Peresmian beroperasinya berlangsung pada tanggal 31 Desember 1960. Penyiar dan reporter yang tidak pernah terlupakan hingga kini, semenjak beroperasinya pada tahun 1960, adalah Alm. H. Idris MZ, Alm. Syam Chandra, Victoria T, Elsy Magdalena, H.Bochri Rachman, H. Hadjar AS, H.Mahdan. Sosok inilah yang

menjadi angkasawan dan angkasawati RRI Mataram yang terus melayani masyarakat semenjak tahun 1960, dengan seorang tehniksi yang menjadi penopang utama pemancar dan antena R. Pangestu.

Acara yang sangat digemari semenjak tahun 1960, terutama pendengar di Lombok dan Sumbawa, adalah Siaran Pedesaan, Pelangi NTB, Sandiwara Radio Bahasa Sasaq, dan Wayang Kulit, di samping acara Berbalas Pantun dan acara hiburan lainnya.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi berguna dalam membantu pencapaian tujuan dan fungsi organisasi supaya pelaksanaan kinerja berjalan dengan efektif dan efisien. Tujuan disusunnya struktur organisasi adalah untuk mengetahui pembagian pekerjaan, hubungan antar bidang, batasan tanggung jawab dan wewenang, dan pembagian fungsi sesuai bidang masing-masing. Satuan kerja LPP RRI Mataram memiliki dan membawahi bidang antara lain :

1. Bagian Tata Usaha
2. Bidang Program Siaran
3. Bidang Pemberitaan
4. Bidang Teknologi dan Media Baru
5. Bidang Layanan dan Pembembangan Usaha

- LPP RRI Mataram berkedudukan di kota Mataram yang merupakan ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat. Alamat kantor : Jl. Langko 83 Ampenan
- RRI Mataram memiliki 14 rumah dinas; 5 buah di Pemancar Ekas di Jl. Majapahit, 3 buah rumah di Tegal Kediri Lombok Barat, 1 buah rumah di Pemancar Tanjung Lombok Utara, 1 buah di Pemancar Suele Lombok Timur, 1 buah di Pemancar Sumbawa, 1 buah di Pemancar Kabupaten Bima dan 1 buah rumah dinas di Pemancar Dompou.
- RRI Mataram memiliki sebuah Stasiun Produksi di Bima dengan alamat di Pesanggrahan Donggo (Belakang kantor camat Donggo), kecamatan Donggo.

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Mataram. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Mataram. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - * harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - * harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - * harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2023	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	708.600.000	708.600.000
Jumlah Pendapatan	708.600.000	708.600.000
Belanja		
Belanja Pegawai	9.272.203.000	7.369.743.000
Belanja Barang	3.042.087.000	3.057.694.000
Belanja Modal	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	12.314.290.000	10.427.437.000

Realisasi Pendapatan
Rp93.926.991

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 93.926.991 atau mencapai 13,26 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 708.600.000. Pendapatan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Mataram terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp 0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 93.926.991. Pendapatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya Kenaikan terjadi karena ada kenaikan pendapatan jasa siaran LPP RRI berupa Radio Spot, Adlib, Dialog Interaktif dan Greeting dari tahun sebelumnya, adanya sewa lahan pemancar Tegal serta adanya pengembalian kelebihan belanja barang kegiatan program siaran dan pemberitaan 2022. dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	708.600.000	93.926.991	13,26
Jumlah	708.600.000	93.926.991	13,26

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 65,05 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	93.926.991	56.907.408	65,05
Jumlah	93.926.991	56.907.408	65,05

Realisasi Penerimaan
Pajak Rp0

B.1.1 Penerimaan Pajak

Realisasi Penerimaan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing- masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Penerimaan Pajak TA TA 2023 sebesar 0,00 dari TA 2022 . Rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Adapun rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan BPHTB	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-
Pendapatan Pajak Lainnya	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-
Pendapatan Bea Keluar	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Pengembalian Pendapatan	-	-	-
Pendapatan Pajak/Bea Cukai	-	-	-

Realisasi Penerimaan
Negara Bukan Pajak
Rp93.926.991

B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing- masing sebesar Rp 93.926.991 dan Rp 56.907.408. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 65,05 dari TA 2022 Kenaikan terjadi karena ada kenaikan pendapatan jasa siaran LPP RRI berupa Radio Spot, Adlib, Dialog Interaktif dan Greeting dari tahun sebelumnya, adanya sewa lahan pemancar Tegal serta adanya pengembalian kelebihan belanja barang kegiatan program siaran dan pemberitaan 2022. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	93.926.991	56.907.408	65,05
Jumlah	93.926.991	56.907.408	65,05

Sedangkan Rincian PNBPN Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNBPN Lainnya Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	5.752.991	5.767.408	(0,25)
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	-	-	-
Pendapatan Jasa Siaran LPP RRI	86.460.000	51.140.000	69,07
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1.714.000	-	-
Jumlah	93.926.991	56.907.408	65,05

Realisasi Belanja
Rp10.391.630.563

B.2 Belanja

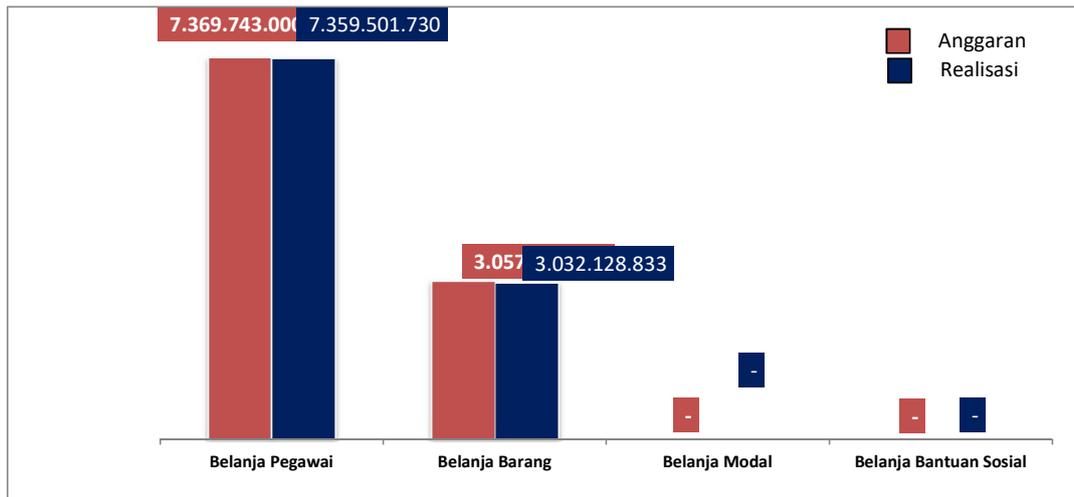
Realisasi Belanja pada TA 2023 adalah sebesar Rp 10.391.630.563 atau 99,66 % dari anggaran belanja sebesar Rp 10.427.437.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2023

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	7.369.743.000	7.359.501.730	99,86
Belanja Barang	3.057.694.000	3.032.128.833	99,16
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	10.427.437.000	10.391.630.563	99,66

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2023



Dibandingkan dengan TA 2022, Realisasi Belanja TA 2023 mengalami penurunan sebesar 8,61% Penurunan Belanja Gaji Pokok PNS dikarenakan adanya purna tugas beberapa pegawai selama tahun 2023.

Penurunan Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) dikarenakan adanya purna tugas beberapa pegawai selama tahun 2023.

Kenaikan Belanja Tunjangan Fungsional PNS dikarenakan adanya Pengangkatan Jabatan Fungsional pada beberapa PNS.

Penurunan Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS dan akun Non PNS Lainnya dikarenakan adanya 24 pegawai PPNPN diangkat menjadi pegawai PPPK.

Kenaikan Belanja PPPK dikarenakan pegawai PPPK yang sebelumnya sebagai Pegawai Non PNS sebanyak 24 Pegawai baru dimulai pada bulan Oktober 2022 sehingga pada tahun 2023 mengalami kenaikan belanja penuh serta adanya penerimaan pegawai baru PPPK sebanyak 3 pegawai dengan TMT 1 Agustus 2023.

Kenaikan/penurunan Belanja Barang dikarenakan adanya kenaikan dan penurunan belanja jasa dan penurunan belanja barang operasional dan adanya penurunan perjalanan dinas pegawai dan perjalanan sehubungan penyiaran.

Penurunan Belanja Barang Operasional dikarenakan adanya Bintang atau penguncian anggaran antara lain, Belanja Barang Operasional Lainnya pada bidang Siaran ataupun Pemberitaan, Belanja Honor Operasional Satuan Keja dan Belanja Barang Operasional Lainnya berupa Pakian Dinas Pegawai.

Penurunan Belanja Barang Non Operasional dikarenakan adanya Bintang atau penguncian anggaran antara lain, Belanja Barang Non Operasional Lainnya berupa Apresiasi prestasi pada kegiatan bidang LPU, siaran serta pemberitaan.

Kenaikan Realisasi Belanja Jasa dikarenakan adanya revisi Anggaran Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubhakti, Satpam dan Sopir yang sebelumnya pada akun 521111 Belanja Keperluan Perkantoran ke akun 522191 Belanja Jasa Lainnya dan adanya penambahan pegawai Cleaning Service dan Satpam sebanyak 4 pegawai pada 1 Januari 2023. Kenaikan realisasi juga dikarenakan adanya penambahan Belanja Jasa Profesi pada kegiatan-kegiatan baru di Bidang Siaran dan Pemberitaan seperti GCM dan Parlemen Menjawab.

Penurunan Realisasi Belanja Pemeliharaan dikarenakan adanya penurunan anggaran pada Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor, Pemeliharaan Kendaraan Bermotor dan Pemeliharaan Peralatan Fungsional sehingga selaras dengan menurunnya realisasi pada tahun 2023.

Penurunan Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri dikarenakan adanya Bintang atau penguncian anggaran antara lain, Belanja Perjalanan Dinas Biasa; Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota kegiatan bidang Siaran dan Pemberitaan; dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota kegiatan bidang LPU sehingga selaras dengan penurunan realisasi pada tahun 2023. Berikut rincian realisasi belanja TA 2023 dan TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Pegawai	7.359.501.730	7.576.249.728	(2,86)
Belanja Barang	3.032.128.833	3.346.580.310	(9,40)
Belanja Modal	-	448.324.667	(100,00)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	10.391.630.563	11.371.154.705	(8,61)

Realisasi Belanja
Pegawai
Rp7.359.501.730

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 7.359.501.730 dan Rp 7.576.249.728. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 14,10 % dari TA 2022. Hal ini disebabkan Penurunan Belanja Gaji Pokok PNS dikarenakan adanya purna tugas beberapa pegawai selama tahun 2023.

Penurunan Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) dikarenakan adanya purna tugas beberapa pegawai selama tahun 2023.

Kenaikan Belanja Tunjangan Fungsional PNS dikarenakan adanya Pengangkatan Jabatan Fungsional pada beberapa PNS.

Penurunan Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS dan akun Non PNS Lainnya dikarenakan adanya 24 pegawai PPNPN diangkat menjadi pegawai PPPK.

Kenaikan Belanja PPPK dikarenakan pegawai PPPK yang sebelumnya sebagai Pegawai Non PNS sebanyak 24 Pegawai baru dimulai pada bulan Oktober 2022 sehingga pada tahun 2023 mengalami kenaikan belanja penuh serta adanya penerimaan pegawai baru PPPK sebanyak 3 pegawai dengan TMT 1 Agustus 2023.

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Gaji Pokok PNS	1.717.649.720	1.925.771.240	(10,81)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	26.295	24.749	6,25
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	134.424.368	151.365.296	(11,19)
Belanja Tunj. Anak PNS	33.702.786	35.376.106	(4,73)
Belanja Tunj. Struktural PNS	33.120.000	110.285.000	(69,97)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	147.578.000	128.825.000	14,56
Belanja Tunj. PPh PNS	11.596.158	13.980.411	(17,05)
Belanja Tunj. Beras PNS	88.859.340	96.680.700	(8,09)
Belanja Uang Makan PNS	274.045.000	287.177.000	(4,57)
Belanja Tunjangan Umum PNS	48.495.000	50.855.000	(4,64)
Belanja Uang Lembur	-	-	-
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1.750.800.021	2.298.557.787	(23,83)
Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS	596.135.200	1.469.890.272	(59,44)
Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	90.402.872	237.722.588	(61,97)
Belanja Pembulatan Gaji Pegawai Non PNS	-	-	-
Belanja Tunjangan Lainnya Non PNS	130.851.000	245.595.000	(46,72)
Beban Gaji Pokok PPPK	948.486.500	195.325.800	385,59
Beban Pembulatan Gaji PPPK	13.469	-	-
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	70.205.934	14.387.358	387,97
Beban Tunjangan Anak PPPK	24.418.520	5.157.462	373,46
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	144.750.000	29.940.000	383,47
Beban Tunjangan Beras PPPK	76.982.460	16.077.240	378,83
Beban Tunjangan Uang Makan PPPK	188.025.000	73.396.000	156,18
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) PPPK	849.474.272	250.495.476	239,12
	-	-	-
Jumlah Belanja kotor	7.360.041.915	6.510.567.643	13,05
Pengembalian Belanja Pegawai	540.185	60.635.757	(99,11)
Jumlah Belanja	7.359.501.730	6.449.931.886	14,10

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 3.032.128.833 dan Rp 3.346.580.310. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami penurunan sebesar 9,40% dari Realisasi TA 2022.

Hal ini antara lain disebabkan oleh Kenaikan/penurunan Belanja Barang dikarenakan adanya kenaikan dan penurunan belanja jasa dan penurunan belanja barang operasional dan adanya penurunan perjalanan dinas pegawai dan perjalanan sehubungan penyiaran.

Penurunan Belanja Barang Operasional dikarenakan adanya Bintang atau penguncian anggaran antara lain, Belanja Barang Operasional Lainnya pada bidang Siaran ataupun Pemberitaan, Belanja Honor Operasional Satuan Keja dan Belanja Barang Operasional Lainnya berupa Pakian Dinas Pegawai.

Penurunan Belanja Barang Non Operasional dikarenakan adanya Bintang atau penguncian anggaran antara lain, Belanja Barang Non Operasional Lainnya berupa Apresiasi prestasi pada kegiatan bidang LPU, siaran serta pemberitaan.

Kenaikan Realisasi Belanja Jasa dikarenakan adanya revisi Anggaran Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubhakti, Satpam dan Sopir yang sebelumnya pada akun 521111 Belanja Keperluan Perkantoran ke akun 522191 Belanja Jasa Lainnya dan adanya penambahan pegawai Cleaning Service dan Satpam sebanyak 4 pegawai pada 1 Januari 2023. Kenaikan realisasi juga dikarenakan adanya penambahan Belanja Jasa Profesi pada kegiatan-kegiatan baru di Bidang Siaran dan Pemberitaan seperti GCM dan Parlemen Menjawab.

Penurunan Realisasi Belanja Pemeliharaan dikarenakan adanya penurunan anggaran pada Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor, Pemeliharaan Kendaraan Bermotor dan Pemeliharaan Peralatan Fungsional sehingga selaras dengan menurunnya realisasi pada tahun 2023.

Penurunan Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri dikarenakan adanya Bintang atau penguncian anggaran antara lain, Belanja Perjalanan Dinas Biasa; Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota kegiatan bidang Siaran dan Pemberitaan; dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota kegiatan bidang LPU sehingga selaras dengan penurunan realisasi pada tahun 2023.

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Barang Operasional	266.258.774	626.575.999	(57,51)
Belanja Barang Non Operasional	212.148.200	231.461.172	(8,34)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	112.584.000	113.720.950	(1,00)
Belanja Jasa	1.556.441.484	1.239.835.092	25,54
Belanja Pemeliharaan	608.260.048	750.069.541	(18,91)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	280.238.923	384.917.556	(27,20)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	3.035.931.429	3.346.580.310	(9,28)
Pengembalian Belanja	3.802.596	-	-
Jumlah Belanja	3.032.128.833	3.346.580.310	(9,40)

Adapun informasi alokasi anggaran belanja untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebagai berikut :

Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebesar Rp0. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2023

URAIAN	Anggaran	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal Rp0

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 448.324.667. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar 100,00% dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh .

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	249.324.667	(100,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	199.000.000	(100,00)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	448.324.667	(100,00)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	448.324.667	(100,00)

Realisasi Belanja Modal Tanah Rp0

B. 2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Realisasi tersebut pada TA 2023 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2022 . Hal ini disebabkan oleh .

Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp0

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 249.324.667, mengalami penurunan sebesar 100,00 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022. Hal ini disebabkan oleh .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	249.324.667	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	-	249.324.667	(100,00)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	-	249.324.667	(100,00)

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 199.000.000 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 mengalami penurunan sebesar 100,00% dibandingkan Realisasi TA 2022. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	199.000.000	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	-	199.000.000	(100,00)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	199.000.000	(100,00)

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2022. Hal ini disebabkan .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2022. Hal ini disebabkan .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Realisasi tersebut pada TA 2023 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2022. Belanja Bantuan Sosial .

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

Keterangan	TAHUN 2023	TAHUN 2022
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Kas di Bendahara Penerimaan Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

Keterangan	TAHUN 2023	TAHUN 2022
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Penerimaan :

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

Keterangan	TAHUN 2023	TAHUN 2022
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Lainnya dan Setara Kas :

C.4 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) disajikan sebagai berikut

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

Keterangan	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Belanja Dibayar Dimuka :

C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)

Saldo Uang Muka Belanja (prepayment) per tanggal per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka Belanja (prepayment) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) adalah sebagai berikut :

Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

Keterangan	TAHUN 2023	TAHUN 2022
	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Uang Muka Belanja :

C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing masing adalah sebesar Rp0. dan Rp2.000.000. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan penerimaan di masa yang akan datang (dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pemerintah pada periode berjalan, karena manfaat atas aset, barang, dan/atau jasa pemerintah telah diterima oleh pihak lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

Keterangan	TAHUN 2023	TAHUN 2022
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	-	2.000.000
	-	-
Jumlah	-	2.000.000

Penjelasan tentang Pendapatan yang Masih Harus Diterima :

C.7 Piutang Perpajakan

Nilai Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Perpajakan merupakan piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak pusat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepastian dan cukai, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Rincian Piutang Perpajakan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Perpajakan Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022
	-	-
Jumlah	-	-

C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang pajak . Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Pajak	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Pajak			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

Piutang Bukan Pajak
Rp36.600.000

C.9 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp36.600.000 dan Rp36.600.000. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022
Piutang Lainnya	-	-
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	36.600.000	36.600.000
	-	-
Jumlah	36.600.000	36.600.000

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Piutang
Bukan Pajak
Rp36.600.000

C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp36.600.000 dan Rp3.375.000. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	1%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	36.600.000	100%	36.600.000
Jumlah	36.600.000		36.600.000

Bagian Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.11 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dengan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

Jenis	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022
-	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Bagian
Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar TPA&. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	1%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

C.13 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

Jenis	TAHUN 2023	TAHUN 2022
-	-	-
Jumlah	-	-

C.14 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR &. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut :

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	1%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-

C.15 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp24.326.250 dan Rp5.665.300. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

Jenis	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022
Barang Konsumsi	1.926.250	4.788.300
Bahan untuk Pemeliharaan	-	877.000
Suku Cadang	22.400.000	-
Jumlah	24.326.250	5.665.300

Persediaan tersebut di atas dalam Persediaan di atas berupa persediaan Barang Konsumsi berupa alat tulis, perlengkapan penunjang dan alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya. Suku Cadang merupakan Suku Cadang Alat Pemancar Lainnya.

Penjelasan terkait dengan persediaan dalam rangka penanganan pandemi covid-19

Persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 merupakan sisa persediaan yang dibeli sendiri atau berasal dari transfer dan hibah yang masih bersaldo dalam keadaan baik dan siap pakai pada tanggal 31 Desember 2023. Berikut ini daftar persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Rincian Persediaan dalam rangka Penanganan pandemi COVID-19

No.	Nama Barang Persediaan	Jumlah Unit	Nilai Rupiah
1			
Jumlah		-	-

Persediaan yang Belum
Diregister Rp0

C.16 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi Rp0

C.17 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

Debitur	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022
-	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.18 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2023 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

Debitur	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Jangka
Panjang lainnya Rp0

C.19 Piutang Jangka Panjang lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya per 31 Desember 2023 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

U R A I A N	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022
Piutang Jangka Panjang lainnya	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang Tak
Tertagih-Piutang Jgk
Panjang Rp0

C.20 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2023 untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Properti Investasi Rp0

C.21 Properti Investasi

Nilai Properti Investasi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Properti Investasi 31 Desember 2023 untuk masing-masing debitor adalah sebagai berikut:

Rincian Properti Investasi Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

U R A I A N	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Rp0

C.22 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Nilai Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi merupakan kontra akun Aset Properti Investasi yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Properti Investasi.

Tanah Rp109.905.378.000

C.23 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp109.905.378.000 dan Rp109.905.378.000. Nilai Tanah tersebut . Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	109.905.378.000
Mutasi tambah :	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
Mutasi kurang :	
Transfer Keluar	-
	-
Saldo per 31 Desember 2023	109.905.378.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Tahunan (Audited) TA 2023

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	2.154 m2	Jl. Langko 83 Ampenan	10.790.763.000
2	19.17 m2	Jl. Majapahit Ekas Ampenan	90.383.522.000
3	500 m2	Aik Bukak Lombok Tengah	218.000.000
4	500 m2	Jl. Raya Medana Tanjung	340.000.000
5	504 m2	Suela Lombok Timur	252.328.000
6	550 m2	Rasane Bima	68.956.000
7	615 m2	Jl. Batu Lanteh Sumbawa	70.049.000
8	500 m2	Jl. Raya Dompu	225.760.000
9	50.000 m2	Tegal Kediri	4.700.000.000
10	5.000 m2	Jl. Tente	2.856.000.000
Jumlah			109.905.378.000

Penjelasan tentang kondisi Tanah

*Tanah Belum Diregister
Rp0*

C.24 Tanah Belum Diregister

Nilai aset tetap berupa Tanah Belum Diregister yang dimiliki per per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Peralatan dan Mesin
Rp15.772.473.676*

C.25 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp15.772.473.676 dan Rp16.039.084.886. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	16.039.084.886
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	736.893.790
Reklasifikasi Masuk	87.491.000
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi Keluar	1.090.996.000
	-
Saldo per 31 Desember 2023	15.772.473.676
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(13.918.062.409)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	1.854.411.267

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

- Adanya Transfer Masuk berupa CCTV - Camera Control Television System sebanyak 4 buah sebesar Rp. 19.668.000,-; Penangkal Petir sebanyak 1 buah sebesar Rp. 87.852.060,-; A.C. Split sebanyak 1 buah sebesar Rp. 8.500.000,-; Televisi sebanyak 1 buah sebesar Rp. 23.890.000,-; Microphone sebanyak 4 buah sebesar Rp. 13.320.000,-; Karpet sebanyak 1 buah sebesar Rp. 14.700.000,-; Audio Mixing Console sebanyak 2 buah sebesar Rp. 58.025.400,-; Microphone/Boom Stand sebanyak 4 buah sebesar Rp. 13.320.000,-; Uninterruptible Power Supply (UPS) sebanyak 2 buah sebesar Rp. 55.403.000,-; Voice Recorder sebanyak 1 buah sebesar Rp. 7.925.400,-; Video Processor sebanyak 1 buah sebesar Rp. 21.625.000,-; Head Set sebanyak 5 buah sebesar Rp. 6.549.000,-; Lighting Head Body sebanyak 1 buah sebesar Rp. 3.441.000,-; Camera Digital sebanyak 1 buah sebesar Rp. 24.795.180,-; Drone sebanyak 1 buah sebesar Rp. 22.548.540,-; P.C Unit sebanyak 10 buah sebesar Rp. 229.336.730,-; Lap Top sebanyak 6 buah sebesar Rp. 95.859.200,-; Printer (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 4 buah sebesar Rp. 20.216.280,-; Hub sebanyak 1 buah sebesar Rp. 9.919.000,- dan adanya Reklasifikasi Masuk berupa Antena VHF/FM Stationary sebanyak 1 buah sebesar Rp. 87.491.000,-.

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa:

- Adanya Reklasifikasi Keluar berupa Guy Tower sebanyak 2 buah sebesar Rp.741.400.000,- dan Switcher/Menara Antena Lainnya sebanyak 3 buah sebesar Rp. 349.596.000,-.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Peralatan dan Mesin
Belum Diregister Rp0*

C.26 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp0 dan Rp0.

Gedung dan Bangunan
Rp13.628.607.680

C.27 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp13.628.607.680 dan Rp12.128.119.680. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	12.128.119.680
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	1.624.264.000
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	496.983.000
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi Keluar	620.759.000
Saldo per 31 Desember 2023	13.628.607.680
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(4.864.540.259)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	8.764.067.421

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

- Adanya Reklasifikasi Masuk berupa Bangunan Gedung Pertemuan Permanen sebanyak 1 Unit sebesar Rp. 274.022.000; Bangunan Rumah Genset berupa 2 Unit sebesar Rp. 346.737.000; dan Bangunan Menara Radio sebanyak 4 Unit sebesar Rp. 1.003.505.000; serta adanya Penerimaan Aset Tetap Renovasi sebesar Rp. 496.983.000,-.

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:

- Adanya Reklasifikasi Keluar berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen sebanyak 3 Unit sebesar Rp. 620.759.000.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan
Belum Diregister Rp0

C.28 Gedung dan Bangunan Belum Diregister

Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Jalan, Irigasi dan
Jaringan Rp33.364.000

C.29 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp33.364.000 dan Rp33.364.000. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	33.364.000
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per	33.364.000
Akumulasi Penyusutan s.d.	(30.980.858)
Nilai Buku per	2.383.142

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

-

Mutasi transaksi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

-

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan
Jaringan Belum
Diregister Rp0

C.30 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Aset Tetap Lainnya
Rp83.555.000

C.31 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp.83.555.000 dan Rp.83.555.000. Aset tetap tersebut . Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	83.555.000
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2023	83.555.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(83.555.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	-

Mutasi tambah/kurang:

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap yang Belum
Diregister Rp0

C.32 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp.0 dan Rp.0.

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0

C.33 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	-
Mutasi tambah:	
Perolehan/Penambahan KDP	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2023	-

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp18.897.138.526

C.34 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp18.897.138.526 dan Rp17.715.659.215. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Audited) Tahun 2023

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	15.772.473.676	(13.918.062.409)	1.854.411.267
2	Gedung dan Bangunan	13.628.607.680	(4.864.540.259)	8.764.067.421
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	33.364.000	(30.980.858)	2.383.142
4	Aset Tetap Lainnya	83.555.000	(83.555.000)	-
Akumulasi Penyusutan		29.518.000.356	(18.897.138.526)	10.620.861.830

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

C.35 Aset Konsesi Jasa

Saldo Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Aset Konsesi Jasa merupakan aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa baik yang disediakan oleh mitra atau disediakan oleh pemberi konsesi. Rincian Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Konsesi Jasa Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

U R A I A N	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022
	-	-
Jumlah	-	-

C.36 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp0 dan Rp0. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan kemitraan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau usaha yang dimiliki. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada . Adapun rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Tahunan (Audited) Tahun 2023

No	U r a i a n	Jumlah
-		-
	Jumlah	-

C.37 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Mataram berupa Software.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2023	-
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-
	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
	-
Saldo Nilai per 31 Desember 2023	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	-

Mutasi transaksi penambahan/pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut :

a. -

C.38 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. . Mutasi transaksi pada Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per	-
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per	-

C.39 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Adapun rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Uraian	T.A. 2023	T.A. 2022
Dana Lainnya	-	-
-	-	-
Total	-	-

Penjelasan Dana Yang Dibatasi Penggunaannya :

C.40 Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Nilai Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri merupakan dana cadangan yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara kepada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri sebagai dana yang dicatat di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perwakilan Republik Indonesia Adapun rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Uraian	T.A. 2023	T.A. 2022
-	-	-
Total	-	-

Penjelasan Dana Cadangan Perwakilan RI :

C.41 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp325.855.500 dan Rp325.855.500. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2023	325.855.500
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2023	325.855.500
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023	(325.855.500)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	-

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Tambah

-

Mutasi Kurang

-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini.

C.42 Aset Lainnya yang Belum Diregister

Saldo Aset Lainnya yang Belum Diregister per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp0 dan Rp0.

C.43 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp325.855.500 dan Rp325.855.500. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	325.855.500	(325.855.500)	-
-	-	-	-
Total	325.855.500	(325.855.500)	-

C.44 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp12.737.100. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A.2022
Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	12.737.100
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	-	-
Total	-	12.737.100

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

Belanja Pegawai atas Gaji Induk PNS, PPPK, dan PPNPN Juli 2023 yang belum terbit SP2D, akan terbit di bulan Juli serta Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya merupakan SPM atas Pembayaran belanja barang bulan januari-maret 2023 dan Pembayaran belanja barang bulan April-Agustus 2023 yang terbit SP2D pada bulan Oktober 2023

C.45 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A.2022
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Yang Belum Ditagihkan :

Hibah Yang Belum Disahkan Rp0

C.46 Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan. Adapun rincian Hibah Yang Belum Disahkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Hibah Yang Belum Disahkan

Uraian	Jumlah
	-
	-
Jumlah	-

Penjelasan tentang Hibah Yang Belum Disahkan :

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Rp0

C.47 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan sebagai berikut :

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A.2022
	-	-
Total	-	-

Penjelasan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan :

Pendapatan Diterima Dimuka Rp3.333.333

C.48 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp3.333.333 dan Rp0. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2022
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	3.333.333	-
	-	-
Total	3.333.333	-

Penjelasan tentang Pendapatan Diterima Dimuka :

Pendapatan sewa merupakan pendapatan atas sewa Lahan Pemancar Tegal dengan Luas 900 m2 dengan Surat Perjalanan Kerjasama Sewa Lahan Nomor: 1019/RRI-MTR/08/2023.

Uang Muka dari KPPN Rp0

C.49 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	-
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	-

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

Utang Jangka Pendek
Lainnya Rp0

C.50 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A.2022
Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

Kewajiban Konsesi
Jasa Rp0

C.51 Kewajiban Konsesi Jasa

Saldo Kewajiban Konsesi Jasa per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kewajiban Konsesi Jasa merupakan kewajiban yang muncul karena adanya perolehan aset konsesi jasa.

Rincian Kewajiban Konsesi Jasa adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A.2022
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

Ekuitas
Rp120.547.232.747

C.52 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp120.547.232.747. dan Rp120.501.995.551. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C.53 Catatan Penting Lainnya neraca

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Perpajakan
Rp0

D.1 Pendapatan Perpajakan

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi pendapatan perpajakan dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh. Rincian Pendapatan perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Perpajakan Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan BPHTB	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-
Pendapatan Pajak Lainnya	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-
Pendapatan Bea Keluar	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp148.029.658

D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp148.029.658 dan Rp93.267.408. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 58,72. Hal tersebut disebabkan oleh Sumber PNBPN Berasal dari Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan dan Pendapatan Jasa Siaran LPP RRI berupa Radio Spot, Adlib, Dialog Interaktif dan Greeting. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.419.658	5.767.408,00	(58,05)
Pendapatan Ongkos Perkara	-	-	-
Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas	-	-	-
Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	-	-	-
Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	-	-	-
Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Korupsi	-	-	-
Pendapatan Jasa Siaran LPP RRI	145.610.000	87.500.000,00	66,41
	-	-	-
Jumlah	148.029.658,00	93.267.408,00	58,72

D.3 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp7.346.764.630 dan Rp7.588.986.828.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai Tahun 2023 sebesar 3,19 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh Penurunan Beban Gaji Pokok PNS dikarenakan adanya pegawai PNS yang pensiun, dengan perkiraan perhitungan seperti berikut: 1 PNS pensiun 8 juta x 12 bulan menjadi sekitar 100JT sehingga Gaji PNS serta Tunjangan yang mengikutinya mengalami penurunan.

Penurunan Beban Tunjangan Struktural PNS dikarenakan pejabat Struktural Kepala Bagian Tata Usaha pensiun pada 31 Desember 2022, sehingga Jabatan tersebut mengalami kekosongan sampai beberapa bulan.

Kenaikan Beban Tunjangan Fungsional PNS dikarenakan adanya Pengangkatan Jabatan Fungsional pada beberapa PNS.

Penurunan Beban Gaji Pokok Pegawai Non PNS dan akun Non PNS Lainnya dikarenakan adanya 24 pegawai PPNPN diangkat menjadi pegawai PPPK.

Adanya akun Beban PPPK dikarenakan pada bulan Oktober 2022 adanya penerimaan pegawai PPPK yang sebelumnya sebagai Pegawai Non PNS sebanyak 24 Pegawai sehingga muncul akun Beban Pegawai PPPK baik Gaji Pokok dan Tunjangan. Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.717.649.720	1.925.771.240	(10,81)
Beban Pembulatan Gaji PNS	26.110	24.364	7,17
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	134.424.368	151.365.296	(11,19)
Beban Tunj. Anak PNS	33.702.786	35.376.106	(4,73)
Beban Tunj. Struktural PNS	33.120.000	110.285.000	(69,97)
Beban Tunj. Fungsional PNS	147.038.000	82.905.000	77,36
Beban Tunj. PPh PNS	11.596.158	13.980.411	(17,05)
Beban Tunj. Beras PNS	88.859.340	96.680.700	(8,09)
Beban Uang Makan PNS	261.307.900	299.914.100	(12,87)
Beban Tunjangan Umum PNS	48.495.000	50.855.000	(4,64)
Beban Uang Lembur	-	-	-
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1.750.800.021	2.292.860.632	(23,64)
Beban Gaji Pokok Pegawai Non PNS	596.135.200	1.462.303.498	(59,23)
Beban Tunjangan Pegawai Non PNS	90.402.872	237.722.588	(61,97)
Beban Tunjangan Lainnya Non PNS	130.851.000	244.930.000	(46,58)
Beban Gaji Pokok PPPK	948.486.500	195.325.800	385,59
Beban Pembulatan Gaji PPPK	13.469	-	-
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	70.205.934	14.387.358	387,97
Beban Tunjangan Anak PPPK	24.418.520	5.157.462	373,46
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	144.750.000	29.940.000	383,47
Beban Tunjangan Beras PPPK	76.982.460	16.077.240	378,83
Beban Tunjangan Uang Makan PPPK	188.025.000	73.285.000	156,57
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	849.474.272	249.840.033	240,01
	-	-	-
Jumlah	7.346.764.630	7.588.986.828	(3,19)

D.4 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp125.763.050 dan Rp118.637.100

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 6,01 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh Kenaikan Beban Persediaan Konsumsi dikarenakan adanya pemindahan akun yang sebelumnya belanja persediaan memakai akun Belanja Persediaan bahan untuk pemeliharaan menjadi memakai akun Belanja Persediaan konsumsi. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Persediaan konsumsi	125.763.050	118.637.100	6,01
Jumlah Beban Persediaan	125.763.050,00	118.637.100	6,01

D.5 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.095.315.958 dan Rp2.047.890.349.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 2,32 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh Penurunan Beban Keperluan Perkantoran dan munculnya akun Beban Jasa Lainnya dikarenakan adanya revisi Anggaran Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubhakti, Satpam dan Sopir yang sebelumnya pada akun 521111 Belanja Keperluan Perkantoran ke akun 522191 Belanja Jasa Lainnya dan adanya penambahan pegawai Cleaning Service dan Satpam sebanyak 4 pegawai pada 1 Januari 2023. Penurunan Beban Honor Operasional Satuan Kerja dikarenakan adanya Bintang atau penguncian anggaran. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Keperluan Perkantoran	128.414.784	411.747.099	(68,81)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.121.990	3.858.900	(45,01)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	109.082.000	142.850.000	(23,64)
Beban Barang Operasional Lainnya	87.790.000	55.020.000	59,56
Beban Bahan	195.265.700	209.261.172	(6,69)
Beban Langganan Listrik	435.074.305	435.936.199	(0,20)
Beban Langganan Telepon	93.176.639	79.127.579	17,75
Beban Langganan Air	15.256.540	24.746.100	(38,35)
Beban Sewa	53.400.000	21.000.000	154,29
Beban Jasa Profesi	442.449.000	535.043.300	(17,31)
Beban Jasa Lainnya	517.085.000	94.000.000	450,09
Beban Barang Non Operasional Lainnya	16.200.000	20.700.000	(21,74)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	13.100.000	(100,00)
Beban Honor Output Kegiatan	-	1.500.000	(100,00)
	-	-	-
Jumlah	2.095.315.958	2.047.890.349,00	2,32

D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp597.134.852 dan Rp741.798.091. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 19,50 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh Penurunan beban dikarenakan perbaikan maupun pemeliharaan pada semester 1 2023 tidak terlalu signifikan dan adanya pemindahan akun yang sebelumnya belanja persediaan memakai akun Belanja Persediaan bahan untuk pemeliharaan menjadi memakai akun Belanja Persediaan konsumsi serta tidak ada akun 523119 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya pada anggaran 2023. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	219.599.646	292.639.881	(24,96)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	174.506.456	183.425.350	(4,86)
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	12.000.000	-	-
Beban Pemeliharaan Jaringan	25.600.250	56.517.160	(54,70)
Beban Pemeliharaan Lainnya	165.428.500	147.985.800	11,79
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	-	40.000.000	(100,00)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	-	21.229.900	(100,00)
	-	-	-
Jumlah	597.134.852	741.798.091	(19,50)

D.7 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp278.804.023 dan Rp384.917.556. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 27,57 persen disebabkan oleh Penurunan dikarenakan adanya Bintang atau penguncian anggaran antara lain, Beban Perjalanan Dinas Biasa; Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota kegiatan bidang Siaran dan Pemberitaan; dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota kegiatan bidang LPU. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Perjalanan Biasa	161.945.023	156.017.556	3,80
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	95.280.000	201.480.000	(52,71)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	21.579.000	26.100.000	(17,32)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	1.320.000	(100,00)
	-	-	-
Jumlah	278.804.023,00	384.917.556	(27,57)

D.8 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 sebesar 0,00 dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 sebesar 0,00 disebabkan oleh . Rincian Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.401.349.636 dan Rp1.511.286.132.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	772.730.607	923.792.237	(16,35)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	623.852.744	582.727.609	7,06
Beban Penyusutan Irigasi	4.766.285	4.766.286	(0,00)
	-	-	-
Jumlah Penyusutan	1.401.349.636	1.511.286.132	(7,27)
	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	1.401.349.636	1.511.286.132	(7,27)

D.11 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp33.225.000 dan Rp3.375.000

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Penyisihan Piutang PNB	33.225.000	3.375.000	884
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang PPh Non Migas	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang PPN	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Cukai dan Bea Materai	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	33.225.000	3.375.000	884

Surplus (Defisit)
Penjualan Aset Non
Lancar Rp0

D.12 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit)
Penyelesaian
Kewajiban Jangka
Panjang Rp0

D.13 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp1.714.000

D.14 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.714.000 dan Rp0.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Audited) TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1.714.000	-	-
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	-	-	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	1.714.000	-	-

Pos Luar Biasa Rp0

D.15 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Tahunan (Audited) 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Pendapatan PNB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Terjadinya pos-pos luar biasa disebabkan sebagai berikut :

D.16 Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19

Beban-beban yang khusus digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dirinci sebagai berikut:

Rincian Beban Khusus Penanganan Covid-19 Tahunan (Audited) 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Penjelasan tentang Beban Penanganan Covid-19 :

D.17 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp.120.501.995.551,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.120.501.995.551,00 dan Rp.121.439.358.393,00

Defisit LO
Rp.11.728.613.491,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.11.728.613.491,00 dan Rp.12.303.623.648,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp.0,00*

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.250.222.500 dan Rp.-53.655.541 yaitu sebagai berikut .

Penyesuaian Nilai Aset
Rp.0,00

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp0,00*

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
	-
Jumlah	-

*Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0,00*

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
	-
Jumlah	-

Selisih Revaluasi Aset
Rp.0,00

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Revaluasi tersebut berasal dari

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2023

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
Revaluasi Aset Tetap	-
	-
Jumlah	-

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.250.222.500 dan Rp.-55.149.141. .

Koreksi ini muncul karena adanya nota dinas nomor: ND.1126/DIR.SDMU/PL.01.02/08/2023 tentang Reklasifikasi/Perubahan Kode Barang. Terdapat 5 pemindahan akun dari Guy Tower dimana 2 transaksi reklasifikasi menjadi Bangunan Menara Radio dan pemindahan akun Switcher/Menara Antena Lainnya dimana 2 transaksi reklasifikasi menjadi Bangunan Menara Radio serta 1 transaksi reklasifikasi menjadi Antene VHF/FM Stationary.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2023

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	250.222.500
Jumlah	250.222.500,0

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.1.493.600. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2023

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	-
Jumlah	-

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.11.523.628.187 dan Rp.11.419.916.347. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember2023

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	10.391.630.563
Diterima dari Entitas Lain	(93.926.991)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	1.225.924.615
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	11.523.628.187

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DKEL sebesar Rp 10.391.630.563, sedangkan DDEL sebesar minus Rp 93.926.991

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp0 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2023

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.225.924.615 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
Saldo Awal	-	22.400.000
Audio Mixing Console	Kantor Pusat	44.550.000
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Kantor Pusat	(17.820.000)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Kantor Pusat	(4.437.500)
Lap Top	Kantor Pusat	35.500.000
P.C Unit	Kantor Pusat	132.534.930
Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kantor Pusat	198.458.000
Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kantor Pusat	198.759.000
Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kantor Pusat	99.766.000
Uninterruptible Power Supply (UPS)	Kantor Pusat	3.365.000
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Kantor Pusat	(1.239.875)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Kantor Pusat	(336.500)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Kantor Pusat	(2.389.000)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Kantor Pusat	(2.162.500)
CCTV - Camera Control Television System	Kantor Pusat	4.917.000
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Kantor Pusat	(491.700)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Kantor Pusat	(1.475.100)
CCTV - Camera Control Television System	Kantor Pusat	14.751.000
Lap Top	Kantor Pusat	19.600.000
P.C Unit	Kantor Pusat	19.600.000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Kantor Pusat	11.838.000
Penangkal Petir	Kantor Pusat	87.852.060
P.C Unit	Kantor Pusat	29.437.200
Audio Mixing Console	Kantor Pusat	13.475.400
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Kantor Pusat	8.378.280
Lap Top	Kantor Pusat	40.759.200
A.C. Split	Kantor Pusat	8.500.000

Televisi	Kantor Pusat	23.890.000
Microphone	Kantor Pusat	13.320.000
Karpet	Kantor Pusat	14.700.000
Uninterruptible Power Supply (UPS)	Kantor Pusat	52.038.000
P.C Unit	Kantor Pusat	15.850.800
P.C Unit	Kantor Pusat	31.913.800
Microphone/Boom Stand	Kantor Pusat	13.320.000
Voice Recorder	Kantor Pusat	7.925.400
Video Processor	Kantor Pusat	21.625.000
Head Set	Kantor Pusat	6.549.000
Lighting Head Body	Kantor Pusat	3.441.000
Camera Digital	Kantor Pusat	24.795.180
Drone	Kantor Pusat	22.548.540
Hub	Kantor Pusat	9.919.000
-	-	-
Jumlah		1.225.924.615

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar 0 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2023

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
-	-	-
-	-	-
Total Pengesahan		-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah		-

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2023 disajikan pada lampiran

*Ekuitas Akhir
Rp120.547.232.747*

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.120.547.232.747,00 dan Rp.120.501.995.551,00.

E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN